



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019
DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185
PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Berbagai kendala dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial antara lain terbatasnya dana, sarana, prasarana dan tenaga baik kualitas maupun kuantitas, sehingga kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum dapat mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan secara optimal. Namun demikian secara umum pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai rencana.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan Pengukuran Kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan selama Tahun 2019.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs. BUDI SANTOSO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680316 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dari sasaran strategis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
3. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Teknis dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Tingkat capaian kinerja bersumber dana APBD mencapai realisasi fisik 95,80%.
3. Anggaran Dinas Sosial dana APBD Tahun 2019 sebesar yaitu BTL = Rp. 14.417.898.655 dan BL = Rp. 29.955.892.536 dengan realisasi keuangan keseluruhan sebesar BTL + BL = Rp. 40.727.564.813 (empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi Fisik sebesar 92,09%

4. Pelaksanaan program telah sesuai dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
5. Indikator Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :
 - a. Adanya peningkatan perubahan perilaku dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Adanya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin penerima bantuan, antara lain pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menyelenggarakan program pelayanan sosial.
 - d. Meningkatnya peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan permasalahan sosial di Kalimantan Tengah.
6. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan secara detail, perlu adanya survey lebih lanjut dan memerlukan waktu serta pembiayaan yang cukup memadai, namun sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan penguatan anggaran yang terfokus kepada Sasaran Strategis yang dimiliki Dinas Sosial yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI.	iii
BAB.I PENDAHULUAN	
BAB.II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL	
A. Proses Pemhaman SPM di Daerah	13
B. Tujuan dan Sasaran.....	19
C. Penetapan Indikator Kinerja Utama	23
D. Penetapan Kinerja 2018	24
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Evaluasi Capaian Kinerja	27
B. Analisis Capaian Kinerja	32
C. Uraian Capaian Kinerja	36
D. Aspek Keuangan	57
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	58
BAB.IV PENUTUP	
A. Penutup.....	62
B. Saran	62
.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari proses Pembangunan Nasional, Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang menjamin setiap warga Negara untuk dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidupnya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan meningkatkan potensi dan sumber pelayanan sosial dasar yang tersedia serta dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial.

Sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami dan melaksanakan proses pembangunan kesejahteraan sosial. Agar proses dimaksud dapat berjalan dengan terencana, terintegrasi, terarah dan berkesinambungan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk Dinas Sosial sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya melaksanakan tugas tersebut, berbagai Program dan Kegiatan baik yang bersumber dana APBD Provinsi maupun APBN secara integratif telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah kelanjutan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dan bukan bersifat final karena pada tahun-

tahun yang akan datang program dan kegiatan dimaksud akan berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 , disusun sebagai dokumen evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Adapun materi dan substansi yang terdapat didalamnya adalah Penetapan Kinerja Tahunan 2019, Pengukuran Pencapaian Sasaran 2019, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan 2019.

B. KEDUDUKAN

Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi (Palangka Raya). Dasar hukum organisasi adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

6. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
7. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
8. Penyiapan bimbingan Teknis dan supervisi di bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;

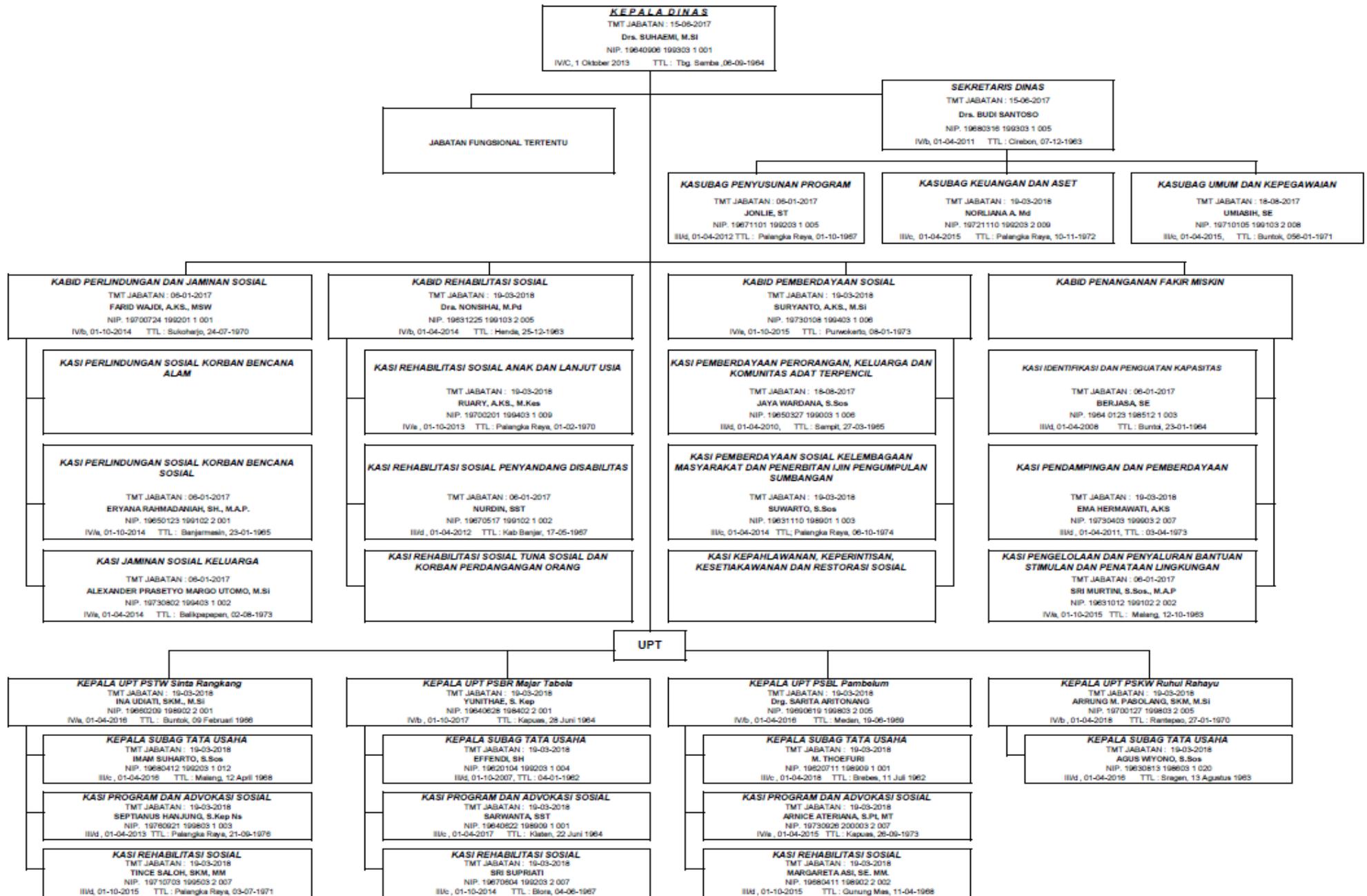
- a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan.
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin,
- a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

UPTD : terdiri dari 4 (empat) panti yaitu:

1. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "MAJAR TABELA"

- a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pelayanan Anak
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "RUHUI RAHAYU"
- a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sinta Rangkang"
- a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Panti Sosial Bina Laras (PSBL) "PAMBELUM"
- a. Kepala Panti
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Bagian Program dan Advokasi
 - d. Seksi Pelayanan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah



D. SUMBER DAYA

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sumber daya manusia dan sumber daya sosial serta sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan sosial yaitu :

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 165 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 111 orang dan pegawai tidak tetap / tenaga kontrak sebanyak 56 orang, untuk melihat kompetensi yang dimiliki, diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di Tabel 1.1

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Sekolah Dasar	2 orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1 orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	35 orang	
4	Diploma Satu (D-1)	-	
5	Diploma Tiga (D-3)	12 orang	
6	Diploma Empat (D-4)	8 orang	
7	Sarjana (S-1)	35 orang	
8	Sarjana (S-2)	18 orang	
9	Sarjana (S-3)	-	*)
	Jumlah	111 orang	

Dari jumlah pegawai sebanyak 111 orang, berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	0	0	0	
2	I/d Juru Muda	0	0	0	
3	II/a Pengatur Muda	2	2	4	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	1	2	
5	II/c Pengatur	4	6	10	
6	II/d Pengatur Tk. I	6	2	8	

7	III/a	Penata Muda	2	5	7	
8	III/b	Penata Muda Tk.I	14	14	28	
9	III/c	Penata	10	6	16	
10	III/d	Penata Tk. I	9	6	15	
11	IV/a	Pembina	3	10	13	
12	IV/b	Pembina Tk. I	3	4	7	
13	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0	
14	IV/d	Pembina Utama Madya	1	0	1	
	IV/e	Pembina Utama	0	0	0	
		Jumlah	55	56	111	

Keterangan: *)

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di Tabel 1.3

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	5	8
3	Eselon IV	14	10	24
4	Fungsional khusus (Pekerja Sosial)	10	18	28
5	Fungsional Umum	27	23	50
	Jumlah	55	56	111

2) Sumber Daya Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan di bidang sosial melibatkan sumber daya sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, adapun sumber daya sosial yang ada antara lain :

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat merupakan relawan sosial yang direkrut atas dasar sukarela untuk membantu masyarakat di lingkungannya yang memerlukan pelayanan sosial, adapun Jenis Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagaimana dalam Tabel 1.4

Tabel 1.4

Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Jenis TKSM	Jumlah	
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	136	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat	902	Orang
3	Taruna Siaga Bencana	1045	Orang
4	Penyuluh Sosial Masyarakat	60	Orang
	Jumlah	2143	

b. Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan kesejahteraan sosial adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, adapun jenis kelembagaan kesejahteraan sosial sebagaimana Tabel 1.5

Tabel 1.5

Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No	Nama Kelembagaan	Jumlah	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial	130	LKS
2	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	14	Lembaga
3	Karang Taruna	570	KT
4	Kelembagaan Dunia Usaha (CSR)	3	Lembaga
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	38	Lembaga
6.	Organisasi Sosial	130	Orsos
	Jumlah	885	

E. LINGKUP STRATEGIS

1. Lingkungan Internal.

- a. Adanya struktur organisasi, Visi, Misi dan Strategi mampu memberikan arah yang jelas tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya.

b. Sumber Daya manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja suatu organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun 2019 mempunyai Pegawai sebanyak 111 orang dengan kualitas pendidikan yang cukup baik yang terdiri dari Jabatan Struktural sebanyak 27 Jabatan dan Jabatan Fungsional sebanyak 28 orang

c. Pedoman pelaksanaan program yang dibuat oleh penanggung jawab program/kegiatan dapat membantu para pelaksana kegiatan di lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian kegiatan sesuai waktu, mutu dan sasaran.

d. Dukungan dana APBN dan APBD.

e. Suasana kerja cukup kondusif.

2. Lingkungan Eksternal.

a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan penguatan bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.

b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan arah yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.

c. Terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 111/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial

akan memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

- d. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- e. Dukungan infrastruktur partisipasi masyarakat seperti PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
- f. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana Dinas Sosial harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah maka Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan melalui pembangunan Sosial selama 2016-2021 adalah mengikuti visi dan misi Gubernur yaitu pada misi keempat yang berbunyi:

**Menuju Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan
Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah Berkah (Bermartabat, Elok,
Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**

Visi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Sosial mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Visi

Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 khususnya pada misi ke Misi keempat yaitu : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan” maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut. Visi yang disepakati oleh seluruh staf Dinas Sosial dan *stakeholders* telah mengacu pada visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, visi dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Berkontribusi dalam penanganan Fakir Miskin.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS).
4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial di masyarakat

Secara terperinci, penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dinas sosial sebagai bagian program dari kementerian sosial mempunyai tugas pokok dalam melakukan penanganan kemiskinan. Penanganan tersebut mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang salah satu diantaranya adalah menyelenggarakan pelayanan sosial berupa meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan

sosial dasar, dan peningkatan kualitas hidup;

2. Meningkatkan kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun tidak semua golongan masyarakat mampu mencapai kondisi sejahtera. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kelompok ini kemudian dikelompokkan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk membantu mereka mencapai kondisi sejahtera, diperlukan keterlibatan pihak lain yang secara terus menerus mendampingi mereka sampai mereka mempunyai kemampuan dalam mengatasi masalahnya sendiri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat stimulan. Hal ini untuk menghilangkan ketergantungan mereka terhadap pihak lain.

Berdasarkan faktor penyebab, program yang diberikan untuk menciptakan kesejahteraan bagi PMKS, disesuaikan dengan kondisi permasalahan sasaran yang kemudian dikelompokkan menjadi program yang bersifat pemberdayaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan ditujukan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa keterbatasan diantara kemampuan sumber daya manusia yang sangat terbatas sehingga jangkauan pelayanan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut.

Salah satu pihak yang paling mendukung terhadap pelaksanaan pelayanan adalah masyarakat sekitar sasaran, baik secara individu maupun lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara sukarela dan bertujuan memberi pelayanan sosial.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

Keberadaan generasi muda dalam suatu negara, merupakan hal yang sangat strategis. Keberlangsungan suatu negara pada masa datang akan sangat bergantung kepada kemampuan mereka dalam mengelolanya. Negara akan terus berkembang dan maju, apabila generasi muda mempunyai kemampuan dan perilaku yang baik. Dan sebaliknya keberadaan negara akan bermasalah apabila generasi mudanya tidak mempunyai kepedulian yang tinggi dan tidak mampu menghormati apa yang telah diraih oleh para pendahulunya.

Globalisasi yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap perilaku generasi muda saat ini. Banyak terjadi pergeseran yang mengarah kepada perilaku negatif. Hal-hal yang dulu dianggap tabu, kini secara perlahan telah berubah. Keberadaban yang dimiliki bangsa Indonesia, perlahan menjadi hilang di ganti dengan budaya-budaya baru yang diadopsi dari negara lain.

Kondisi-kondisi diatas, apabila tidak ditangani secara dini akan menyebabkan hilangnya jatidiri bangsa Indonesia yang sangat luhur. Kepedulian sosial akan luntur. Generasi muda tidak lagi merasa sebagai bagian dari pemegang amanah yang harus siap dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan negaranya. Mereka menjadi generasi apatis yang tidak peduli kepada lingkungan sekitar dan bersifat individualistis yang lebih mementingkan diri sendiri di banding dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, pemerintah harus memfasilitasi harapan dan meneruskan cita-cita pahlawan dalam memelihara budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu upaya adalah mengingatkan generasi muda tentang cita-cita pahlawan melalui kegiatan yang bersifat edukasi dan membangun kekuatan kebangsaan, melibatkan dalam kegiatan sosial, dan memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan kesetiakawanan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan mampu memotivasi secara lebih efektif terhadap pengahargaan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Dinas Sosial. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber

daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemampuan keluarga fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar
 - Meningkatkan peranan dan fungsi sosial dimasyarakat.
- b. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS
 - Meningkatkan kemampuan aksesibilitas bagi PMKS

- Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS
- c. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pengembangan, perluasan dan penguatan jaringan kerja ;
- Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial masyarakat.
 - Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan mental dan sosial pada masa mendatang (revolusi mental).
 - Meningkatkan kesetiakawanan sosial di masyarakat (restorasi kesetiakawanan sosial).
 - Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan kepada generasi muda.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Sosial dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif

dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Renstra periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam penanganan fakir miskin.
 - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri
 - Meningkatnya peranan dan fungsi sosial dimasyarakat secara wajar;
 - Berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial PMKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses sumber pelayanan yang tersedia dalam upaya menumbuhkan kemandirian sosial.
 - Meningkatnya pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi PMKS kategori rentan dalam pemenuhan hak dasar.
3. Meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial (PSKS), melalui peningkatan profesionalisme pelayanan sosial serta pembentukan, perluasan dan penguatan jaringan kerja. Sasarannya adalah sebagai berikut :
 - Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
 - Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

4. Meningkatkan pemanfaatan modal sosial dengan membangun kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
 - Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya memelihara nilai-nilai pahlawan sebagai acuan pembangunan mental generasi muda pada masa mendatang
 - Meningkatnya kesetiakawanan sosial di masyarakat melalui restorasi kesetiakawanan sosial.

**C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pendamping sosial yang mengikuti bimtek	
	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	

Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling dan kampanye sosial	
	Jumlah Anak terlantar	
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi	
	Jumlah Lanjut Usia dalam Keluarga	
	Jumlah penyandang eks Psikotik di dalam panti	
Meningkatnya Pembinaan Bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan ketrampilan	
Meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma dan trauma yang di dayagunakan	
	Jumlah korban tindak kekerasan di Trauma Center	
Meningkatnya Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar pada Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang	
Meningkatnya Pembinaan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang Penyalahgunaan NAPZA	
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima pendidikan dan pelatihan berusaha	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang diberdayakan	
	Jumlah LKS yang diberdayakan	
	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	
	Jumlah masyarakat yang menanam nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	
	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	
	Jumlah Instansi/Lembaga yang berpartisipasi dalam sosialisasi	

Meningkatnya Pelindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan alam	
	Jumlah lokasi pengendalian program PKH	
	Jumlah Pembinaan KSB	
	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	

D. PENETAPAN KINERJA 2019

Pada Tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan program/kegiatan penanganan permasalahan sosial sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah pendamping sosial	370 Orang	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha keluarga Miskin	920.000.000
		Jumlah keluarga miskin	220 KK	Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.	1.170.000.000
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling	50 orang	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi penyandang masalah sosial (PMKS)	130.000.000
		Jumlah anak terlantar	80 orang	Kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR	1.441.000.000
		Jumlah wanita rawan sosial ekonomi	40 Orang	Kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW	675.000.000
		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan sosial dalam keluarga	39 orang	Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam keluarga	200.000.000
		Jumlah penyandang eks psikotik di dalam panti	10 orang	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	500.000.000
3.	Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar	15 orang	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar	150.000.000
4.	Meningkatnya pembinaan Para Penyandang	Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang di dayagunakan	15 orang	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	275.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Dana
1	2	3	4	5	6
	Cacat dan Trauma	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapat perlindungan di trauma center	25 orang	Perlindungan Sosial bagi PMKS di Trauma Center	180.000.000
5.	Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Lanjut Usia terlanjut yang mendapat pelayanan dalam panti sosial tresna werda sinta rangkang	80 orang	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	1.500.000.000
6.	Meningkatnya pembinaan terhadap Eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	1 Laporan	Pembinaan eks penyandang penyalahgunaan NAPZA	120.000.000
		Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima pendidikan dan pelatihan berusaha	80 orang	Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	315.000.000
7.	Meningkatnya pemberdayaan bagi lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah TKSK yang diberdayakan	35 TKSK	Pemberdayaan Karang Taruna	300.000.000
		Jumlah LKS yang diberdayakan	6 Orsos	Pemberdayaan Organisasi Sosial	421.385.000
		Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	30 Orang	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	378.615.000
		Jumlah Masyarakat yang memahami nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakwanan sosial	1 Laporan	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan kesetiakwanan sosial	400.000.000
		Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan / 1 Laporan	Fasilitasi Komda Lansisa	127.500.000
		Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi dalam sosialisasi	1 Laporan	Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial	50.000.000
8.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	100 orang	Pemberi bantuan sosial bagi PMKS	1.060.750.000
		Jumlah lokasi pengendalian program PKH	14 kab/kota	Pengendalian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	2.283.100.000
		Pembinaan Bagi TAGANA	50 Orang	Pembinaan Kampung Siaga Bencana	50.000.000
		Jumlah PMKS yang menerima bantuan Korban Bencana Sosial.	1 Laporan	Perlindungan Sosial Korban bencana Sosial	300.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

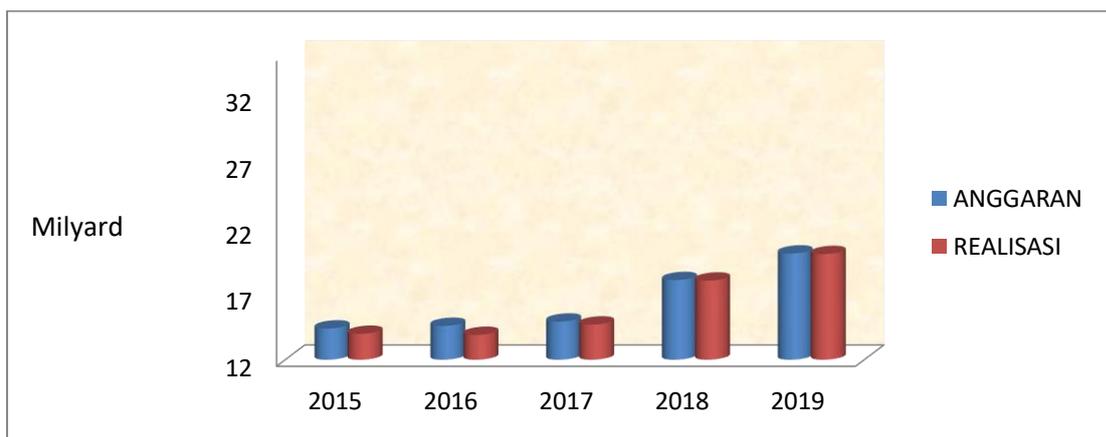
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 8 sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2019. Untuk mencapai 8 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 14 (empat belas) Program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 29.955.892.536 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp. 28.561.333.867 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar (95,80 %)

Terjadi fluktuasi anggaran bersumber dana APBD. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan maupun penurunan anggaran sebagaimana sebagai tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perkembangan Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bersumber Dana APBD
Periode Tahun 2015 – 2019.



Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan perubahan sasaran kegiatan ada setiap tahun berjalan.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja program yang mencapai realisasi fisik 100% khususnya dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian target, adalah terdapat penyesuaian anggaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara ini tahapan dalam melakukan anggaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat beberapa sasaran yang mengalami perubahan jumlah sasaran khususnya berkaitan dengan terjadinya penambahan anggaran Tahun 2019. Capaian kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

APBD								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2019			Keterangan
			2017	2018	Target	Realisasi	(%) Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Keluarga Miskin	30 KK	250 KK	220 KK	220 KK	100 %	turun 10 %

	dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah pendamping sosial	78 org	50 org	370 org	50 org	100 %	Naik 100%
--	---	--------------------------	--------	--------	---------	--------	-------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling	50 org	50 org	50 org	50 org	100 %	tetap
		Jumlah anak terlantar sosial ekonomi yang mengikuti kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan PSBR	100 org	80 org	80 org	80org	100 %	tetap
		Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mengikuti kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan PSKW	-	40 org	40 org	40 org	100 %	tetap
		Jumlah Lanjut Usia dalam keluarga	30 org	30 org	39 org	39 org	100 %	Naik 5%
		Jumlah penyandang eks psikotik di dalam panti	10 org	10 org	10 org	10 org	100 %	Tetap
3.	Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar	15 org	15 org	15 org	15 org	100 %	tetap
4.	Meningkatnya pembinaan Para penyandang cacat dan truma	Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang di dayagunakan	80org	10 org	15 org	15 org	100 %	Naik 5 %

		Jumlah Korban Tindak Kekerasan di Trauma Center	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	100 %	tetap
5.	Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapat pelayanan dalam panti sosial tresna werdhawidya sinta rangkang	80 org	85 org	80 org	80 org	100 %	Turun 5%
6.	Meningkatnya Pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	50 org	40 org	40 org	40 org	100 %	tetap
		Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang menerima pendidikan dan pelatihan berusaha	40 org	40 org	80 org	80 org	100 %	Naik 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya pemberdayaan bagi lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah TKSK yang diberdayakan	15 org	35 TKSK	35 TKSK	35 TKSK	100 %	tetap
		Jumlah LKS	-	6 Orsos	6 Orsos	6 Orsos	100 %	tetap
		Jumlah Karang Taruna	-	50 org	50 org	30 org	100 %	Turun 10%
		Jumlah Masyarakat yang memahami nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	2000 org	2000 org	2000 org	2000 org	100 %	Tetap
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100 %	Tetap
		Jumlah instansi / lembaga yang berpartisipasi	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100 %	Tetap
8.	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana dan	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial	100 org	100 org	100 org	100 org	100 %	Tetap
		Jumlah lokasi pengendalian program PKH	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	100 %	Tetap

masyarakat rawan bencana.	Jumlah Instansi/ lembaga yang berpartisipasi dalam sosialisasi	0	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100 %	tetap
	Jumlah pembinaan KSB	-	100 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	Turun 50%

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2019 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu *inputs*, *outputs* dan *outcomes*. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya *benefits* maupun *impacts* beberapa kegiatan pada Tahun 2019.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2019 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

1. Pengukuran Kinerja

a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\quad}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$: Berhasil

$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori X Mean Kategorinya}) \times 100\%}{\text{Jumlah Indikator}}$$

b) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar

didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran dalam tataran output (keluaran) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ($\leq 70X < 85$)	Cukup Berhasil ($55 \leq X < 70$)	Tidak Berhasil ($X < 55$)
1	Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100			
2	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100			
3.	Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar	100			
4.	Meningkatnya pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100			
5.	Meningkatnya pembinaan Panti Panti asuhan/ Panti Jompo	100			
6.	Meningkatnya pembinaan terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	100			
7.	Meningkatnya Pemberdayaan bagi lembaga kesejahteraan sosial.	100			
8.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana	100			

Dari 8 (delapan) sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Sangat Berhasil	8	100 %
• Berhasil	-	-
• Cukup Berhasil	-	-
• Tidak Berhasil	-	-
Jumlah	8	100%

C) Uraian Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Tahun 2019			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin	220 KK	220 KK	220 KK	220 KK	100 %
		Jumlah pendamping sosial	370 org	370 org	370 org	370 org	100 %

Salah satunya kegiatan prioritas dalam sasaran strategis ini adalah pemberdayaan Fakir Miskin. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 berupa pemberian sarana dan prasarana untuk usaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 220 KK

dengan lokasi 14 kabupaten/ Kota. Terdapat pengurangan sasaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10 %. Pada Tahun, pada Tahun 2018 berubah menjadi 250 KK sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 220 KK atau berkurang sebanyak 30 KK. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah anggaran yang dialihkan ke realisasi fisik pada dinas sosial.

Sementara capaian realisasi Tahun 2019 bila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD SKPD) sebesar 100 %. Capaian ini merupakan bukti dari komitmen daerah dalam mengimbangi program pemerintah pusat dalam penanganan kemiskinan. Meskipun jumlah alokasi belum sebanding dengan alokasi dana APBN yang dikucurkan bagi penanganan fakir miskin di Kalimantan Tengah, namun jumlah tersebut tidak mengalami penurunan termasuk dalam target Rencana Jangka Menengah pada Dinas Sosial Kalimantan Tengah. Tabel berikut ini menggambarkan realisasi capaian kinerja Tahun 2019 dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama.

Tabel 3.4 perbandingan target Renstra dengan realisasi 2019

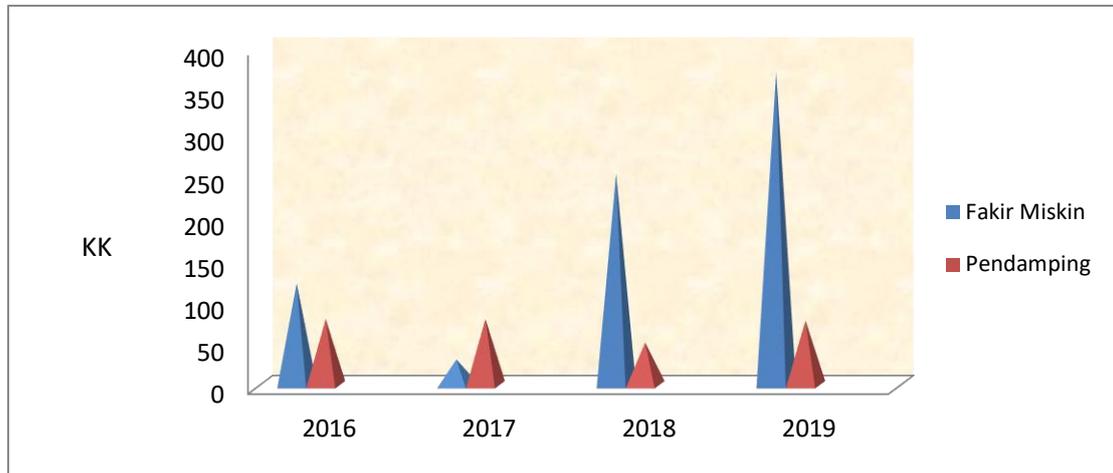
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Capaian Tahun 2019	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin	220 KK	220 KK	100 %	
		Jumlah pendamping sosial	370 org	370 org	100 %	

Pada indikator berikutnya, sebagai upaya mengefektifkan program penanganan fakir miskin tersebut, dialokasikan kegiatan pendampingan bagi Kelompok Masyarakat yang mendapat bantuan. Tugasnya adalah mendampingi, memonitoring serta membimbing kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Masyarakat. Jumlah pendamping sebanyak 76 orang dan berasal dari lokasi penerima bantuan. Jumlah tersebut

bertambah dari jumlah tahun sebelumnya hanya 50 orang. Demikian juga, bila dibandingkan dengan target renstra, jumlah ini tidak mengalami penurunan

Secara terperinci, hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi kinerja pada periode sebelumnya yang menunjukkan penurunan jumlah sasaran.

Secara lebih jelas dapat dilihat dalam grafik berikut ini



Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan



Gambar 3.1 Pemberdayaan Kube

kelompok masyarakat miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian sarana dan prasarana usaha yang disalurkan melalui perbankan maupun bantuan sarana dan prasarana.

Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh beberapa hal diantaranya :

- Verifikasi penerima bantuan secara selektif untuk menghindari salah sasaran
- Adanya bimbingan teknis dan keterampilan kepada penerima bantuan.
- Pendampingan yang efektif.
- Pemberian bantuan sesuai dengan minat dan kondisi daerah
- Koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi dengan Instansi Sosial Kabupaten/kota.

1.2 Realisasi Outcomes

Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan khususnya bagi sasaran adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberdayakan dirinya secara mandiri dari aspek sosial ekonomi. Keluarga miskin diberi bantuan stimulan agar mempunyai usaha kecil sesuai dengan kemampuan dan potensi diri dan lingkungannya. Selain itu dari aspek sosial, para Keluarga Miskin mempunyai suatu komunitas yang mempermudah mereka berinteraksi sesama anggota kelompok. Dengan adanya relasi tersebut diharapkan, secara perlahan membentuk pribadi-pribadi yang mampu menciptakan relasi secara luas sehingga mendukung perkembangan baik sosial maupun ekonomi.

2. Sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2019			Keterangan
			2019	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah (Tuna Sosial, Korban Napza dan Penyandang Cacat)	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling	50 orang	50 Orang	50 Orang	100 %	tetap
		Jumlah anak terlantar yang mengikuti kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan PSBR	80 org	80 Orang	80Orang	100 %	tetap

	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mengikuti kegiatan bimbingan sosial dan pelatihan PSKW	40 org	40 org	40 org	100 %	tetap
	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan sosial dalam keluarga	39 org	39 org	39 org	100 %	tetap
	Jumlah penyandang eks psikotik di dalam panti	10 org	10 org	10 org	100 %	Tetap

Program yang dilaksanakan dalam sasaran ini diantaranya adalah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan di Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Karya Wanita dimana panti ini yang awalnya di gabung kemudian dipisahkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kedua panti ini terletak di Kota Palangka Raya. Jumlah siswa untuk PSBR sebanyak orang terdiri dari 80 (delapan puluh) Anak terlantar. Setiap tahun PSBR terdiri dari 2 (dua) angkatan dengan jumlah siswa masing-masing angkatan sebanyak 40 (empat puluh) orang.





Gambar 3.2 Pelatihan Siswa PSBR

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) jumlah siswa sebanyak 40 (empat puluh) Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan untuk PSKW berlaku hal yang sama seperti PSBR terdiri dari 2 (dua) angkatan dengan jumlah 20 (dua puluh) orang.



Gambar 3.3 Pelatihan Siswa PSKW

Program lain adalah Bantuan Stimulan bagi hidup Lanjut Usia berbasis keluarga sebanyak 30 orang dengan lokasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Program ini memberikan bantuan bagi Lanjut Usia produktif dengan mengutamakan peran keluarga sebagai basis utama pelayanan.

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial eks psikotik. Secara alur kerja sasaran program ini merupakan eks penghuni rumah sakit jiwa yang dikuatkan keberfungsian sosial melalui pembinaan dalam panti. Untuk tahap awal jumlah yang mampu ditangani sebanyak 10 orang dan ditangani pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum. Sesuai dengan rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Sosial maka jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pengembangan yang terintegrasi antara fisik dan pengelolaan pelayanan termasuk penguatan dalam bidang sumber daya manusia.



Gambar 3.4 Penderita ODGJ pada PSBL

2.1 Realisasi Outcomes

Sasaran ini merupakan kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan kembali orang atau penyandang masalah kesejahteraan sosial agar bisa teratasi masalahnya yang meliputi; pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.

Dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR),
- Bimbingan sosial dan keterampilan pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW),
- Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak,
- Pelayanan sosial bagi penderita eks psikotik (gangguan jiwa) pada Panti Sosial Bina Laras Pabelum.

Secara umum, kegiatan dalam kelompok sasaran ini, selain memberikan penanganan rehabilitasi kepada klien, juga diciptakan hal-hal yang bersifat preventif seperti sosialisasi bagi remaja tentang penyalahgunaan Napza, atau sosialisasi bahaya HIV/AIDs di lokalisasi. Sementara untuk menciptakan keberfungsian sosial kelayan, dilaksanakan kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan lingkungan mereka diantaranya bimbingan dan pelatihan keterampilan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan stimulan.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran ini adalah meningkatkan keberfungsian sosial PMKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi sehingga bantuan sosial diberikan

Sementara bagi Penyandang Masalah yang dianggap masih mampu melakukan mobilitas fisik secara mandiri, bantuan yang diberikan berupa stimulan usaha ekonomis produktif yang bertujuan menguatkan mereka dalam sisi ekonomi sehingga bisa lebih mandiri dan tidak membebani keluarganya.

3. Sasaran Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Ket.
			2018	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar	15 org	15 org	15 org	100 %	tetap

Kegiatan yang dilaksanakan dalam sasaran ini adalah pemberian latihan keterampilan berusaha sesuai dengan bakat dan minat masing-masing sasaran. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan jumlah sasaran sebanyak 15 orang. Sementara sebagai pelatih dan Nara sumber dipilih dari kalangan profesionalitas dan akademisi yang ada di Kotawaringin Timur.

Tindak lanjut pelatihan tersebut adalah pemberian bantuan peralatan kerja. Diharapkan bantuan ini dapat memotivasi sasaran sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan berkreaitifitas di masyarakat.

Tidak terdapat perubahan sasaran kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak mengalami peningkatan. Hal ini juga sejalan dengan capaian target renstra sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

3.7 Perbandingan target Renstra dengan realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian 2019	(%) capaian	ket
1	2	3	4	5	6	7
3.	Meningkatnya pembinaan bagi Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar	30 org	15 org	50 %	Tidak tercapai

Dalam indikator ini, target renstra tidak tercapai,. Hal ini disebabkan kinerja yang tidak mencapai 100 % yaitu program pembinaan anak terlantar dimana jumlah Anak terlantar yang mengikuti pengembangan bakat dan ketrampilan yang mengikuti hanya 15 orang dari target renstra yang sebelumnya sebanyak 30 orang maka dari itu realisasi hanya mencapai sekitar 50 % capaian kinerja. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana pada indikator

tersebut. secara berkala seyogianya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dana dampingan untuk kegiatan ini, mengingat keberlanjutan program menjadi kewenangan kabupaten/kota termasuk pemberian bantuan stimulan pasca diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial Provinsi.

3.2 Realisasi Outcomes

Tujuan program dan kegiatan yang ditujukan untuk sasaran 3 adalah memberikan keterampilan dan kemampuan kerja bagi Anak Terlantar yang ada di Kalimantan Tengah. Sesuai dengan tujuan pelayanan sosial, maka orientasi pelatihan tidak hanya pada aspek keterampilan dan kemampuan kerja saja melainkan kepada aspek mental dan sosial anak. Pelatihan diharapkan mampu mengubah cara berfikir anak menjadi lebih positif dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sementara dari aspek sosialnya, diharapkan mereka mempunyai jaringan yang lebih luas yang dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi secara luas di masyarakat.

Manfaat lain yang diperoleh adalah pemanfaatan waktu luang anak secara lebih berguna bagi diri dan lingkungannya. Perkembangan psikologis anak yang meningkat remaja akan berpengaruh terhadap potensi energi dalam diri mereka, sehingga kalau hal ini tidak disalurkan akan menyebabkan perilaku aktif yang tidak terkontrol dan yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Dengan adanya program dan kegiatan ini, maka energi mereka akan mudah disalurkan secara lebih bermanfaat.

4. Sasaran Meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Tabel 3.8 perbandingan target renstra dengan Realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun 2019	(%) capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang di dayagunakan	30 orang	15 org	100 %	Tidak tercapai

	Jumlah Korban Tindak kekerasan yang mendapat perlindungan di Trauma Center	30 Orang	25 Orang	100 %	Tidak tercapai
--	--	----------	----------	-------	----------------

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma capaian kinerja tidak mencapai 100 % karena target renstra yang sebenarnya 30 orang hanya terealisasi 15 orang maka dari itu capaian kinerja hanya mencapai 80 %. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah anggaran yang diberikan kurang alokasi dana pada indikator tersebut.

Program-program yang dilaksanakan dalam menangani sasaran ini adalah meningkatkan keberfungsian sosial PMKS dalam kategori pemulihan baik secara mental, sosial dan ekonomi sehingga bantuan sosial diberikan sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi sasaran. Beberapa bantuan yang diberikan berupa pemberian alat bantu bagi Penyandang Cacat diantaranya kaki palsu, alat bantu dengar, tongkat penyangga. Bantuan tersebut dimanfaatkan penyandang cacat untuk memudahkan mobilitas secara lebih baik dan menciptakan relasi sosial yang luas dalam mendukung keberfungsian sosial mereka.

5. Sasaran Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2019			Ket.
			2018	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Lanjut Usia dalam panti	80 org	80 orang	80 orang	100 %	tercapai

Program ini dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werda “Sinta Rangkang” Palangka Raya sebanyak 80 orang berupa pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti jompo selama satu tahun. Program ini bersifat tetap dengan jumlah target yang bisa berubah kapan saja tergantung dari banyaknya klien yang ada panti Sosial tresna werdha sinta rangkang untuk setiap tahun anggaran selama 5 tahun sesuai dengan dokumen perencanaan menengah. Hal ini juga dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Target Renstra dengan realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2019 Realisasi	(%) capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Lanjut Usia dalam panti	100 orang	80 orang	100 %	tetap

Dalam tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa kegiatan pelayanan pada panti jompo, tidak mengalami penambahan tapi mengalami penurunan dari banyaknya penghuni panti dari yang awalnya penghuni panti 100 orang menjadi 80 orang penghuni panti.

4.2 Outcomes

Pelayanan yang dilaksanakan oleh panti bertujuan agar para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman, nyaman, dan sejahtera dari aspek fisik, mental, sosial dan spiritualnya. Dengan tujuan tersebut jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa :



- Pelayanan fisik (pengasramaan, permakanan, pakaian, dll)
- Pelayanan keagamaan (bimbingan rohani, tuntunan beribadah, dll)
- Pelayanan sosial (bimbingan individu/ kelompok)
- Pelayanan keterampilan (kegiatan hobi dan pengisian waktu luang)
- Pelayanan psikologis (konsultasi, terapi kelompok, dll)
- Pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan rutin, obat-obat ringan)
- Pelayanan pendampingan (kegiatan sehari-hari dalam dan di luar panti)

- Rekreasi (dharmawisata, mendengarkan musik, dll)
- Pelayanan pemakaman (pengurusan jenazah)

Dengan pelayanan tersebut diharapkan para lanjut usia penghuni panti dapat menikmati sisa hidupnya sesuai dengan tujuan diatas.

6. Sasaran Meningkatnya pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Tabel 3.11 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2019			Keterangan
			2018	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
6.	Meningkatnya pembinaan Eks penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima bimbingan mental sosial	50 org	1 Lap.	1 Lap.	100 %	tetap
		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (BWBLP)	40 org	80 org	80 org	100 %	naik

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat perubahan kinerja pada Tahun 2019 seperti pada pembinaan terhadap Eks penyandang penyakit sosial (BWBLP).

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian ketrampilan berusaha bagi Klien Eks Narapidana, anak kurang mampu, dan Penyakit Sosial dengan tujuan sebagai upaya preventif agar mereka berada dalam kondisi sosial yang baik dan tidak kembali menjadi orang-orang yang bermasalah sosial. Kegiatan diikuti 80 orang yang di bagi menjadi 2 angkatan masing- masing 40 orang yang berlokasi di Kota Palangka Raya.

Sementara bila dibandingkan dengan target Renstra, capaian Tahun 2019 belum dapat memenuhi target. Hal ini dapat digambarkan pada tabel berikut .

Tabel 3.12 Perbandingan Target Renstra dengan realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Tahun 2019	(%) capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

6.	Meningkatnya pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima bimbingan mental sosial	120 org	1 Laporan	100 %	Tetap
		Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial (BWBLP)	80 org	80 org	100 %	Naik 100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2019 sebagian sudah sesuai dengan target Renstra Dinas Sosial. Namun demikian jumlah sasaran mengalami peningkatan sehubungan sharing dana kabupaten/kota dalam kegiatan ini cukup bertambah.

7. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah.



Pada Tahun 2019 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personalnya maupun kepada organisasi yang mewadahnya. Hal ini dianggap akan lebih efektif

karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.13 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2019			Keterangan
			2018	Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
7.	Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK	35 org	35 org	35 org	100 %	tetap
		Jumlah LKS	6 orsos	6 Orsos	6 Orsos	100 %	tetap
		Jumlah Karang Taruna	50 org	30 org	30 org	100 %	turun
		Jumlah Masyarakat yang memahami nilai-nilai K4S	2000 org	2000 org	2000 org	100 %	tetap
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	1 keg	1 keg	1 keg	100 %	tetap

Kinerja kegiatan-kegiatan diatas mencapai 100 %. Sementara itu, terdapat beberapa perubahan indikator sasaran yaitu kegiatan pemberian bantuan operasional berubah menjadi kegiatan pelatihan untuk pengurus LKS tetapi pada indikator lain bersifat tetap.

Bila dibandingkan dengan target Renstra bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan target renstra dengan realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2019	(%) capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
7.	Meningkatnya Pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK	35 org	35 org	100 %	terpenuhi
		Jumlah LKS	20 org	6 Orsos	100 %	terpenuhi
		Jumlah Karang Taruna	20 org	1 Karang Taruna	100 %	terpenuhi
		Jumlah Masyarakat yang memahami nilai-nilai K4S	1000 org	2000 org	100 %	terpenuhi
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	1 keg	1 keg	100 %	tetap

		Jumlah instansi/lembagayang berpartisipasi dalam sosialisasi	1 Lap	1 Lap	100 %	tetap
--	--	--	-------	-------	-------	-------

Bila dibandingkan dengan target renstra dengan realisasi Tahun 2019, terdapat realisasi yang cukup tinggi, hal ini karena adanya perubahan jenis kegiatan dalam beberapa indikator yaitu yang semula bantuan operasional menjadi kegiatan pelatihan yang dapat melibatkan lebih banyak sasaran. Namun kedepan target ini juga akan dikurangi sesuai dengan kemajuan LKS agar lebih mandiri.

6.3 Outcomes (Manfaat)

Dalam penanganan permasalahan sosial, selain bekerja sama dengan aparat pemerintah, Dinas Sosial juga mempunyai mitra kerja di masyarakat yang tergabung dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Peran mereka sangat penting dalam tercapainya keberhasilan program karena stakeholder ini mempunyai keterkaitan yang erat dalam sistem lingkungan penyanggah masalah, baik secara fisik maupun emosional. Potensi dan sumber tersebut adalah Organisasi Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepedulian Sosial Dunia Usaha (CSR). Program yang diprioritaskan bagi mereka adalah pengembangan kapasitas sehingga secara profesional mereka dapat melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan pada sasaran ini diantaranya adalah :

- Partisipasi masyarakat secara umum yang meningkat dalam pelayanan-pelayanan sosial ditandai dengan keterlibatan dalam program yang dilaksanakan baik secara individu maupun masyarakat sebagai komunitas.
- Kegiatan pembentukan forum CSR telah memberikan informasi yang jelas bagi perusahaan tentang kewajiban perusahaan dalam keterlibatan mereka dalam

memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

- Meningkatnya partisipasi lembaga-lembaga sosial swasta (LKS) dengan memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan sebagai hasil dari penguatan kapasitas.

7. Sasaran Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana.

Tabel 3.15 Realisasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018	Tahun 2019			Keterangan
				Target	Realisasi	(%) capaian	
1	2	3	5	6	7	8	9
8.	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana.	Jumlah PMKS	100 org / 14 kab/kota	100 org / 14 kab/kota	100 org / 14 kab/kota	100 %	tetap
		Jumlah lokasi pengendalian program PKH	14 Kab/kota	14 Kab/kota	14 Kab/kota	100 %	tetap
		Pembinaan Bagi TAGANA (KSB)	50 Org	50 Org	50 Org	100 %	tetap
		Jumlah PMKS yang menerima bantuan Korban Bencana Sosial	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	turun

Dalam sasaran ini kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah pemulangan orang terlantar ke provinsi terdekat. Sementara kegiatan lain adalah pendampingan terhadap kegiatan penyaluran bantuan bencana bersumber dana APBN sehingga program bersifat sinergis dan saling melengkapi.

Kegiatan lain yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Palangka Raya. Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota.

Kegiatan baru yang dilaksanakan adalah Kegiatan pembinaan KSB dengan jumlah 50 orang pada tahun 2019. Bentuk kegiatan berupa terlaksananya Bimtek Bagi TAGANA, Tokoh masyarakat dan pengerahan massa untuk penanganan bencana.

Bila dibandingkan dengan target renstra, capaian kinerja Tahun 2019 ada kenaikan walaupun hanya sedikit, dan selebihnya bersifat tetap, Hal ini karena kegiatan dalam indikator ini sangat berkaitan dengan alokasi dana pusat yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Kegiatan bersumber dana APBD merupakan dana dukungan untuk memfasilitasi program/kegiatan Pusat di Provinsi.

Kondisi kinerja dalam indikator ini, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Perbandingan Target Renstra dibandingkan Realisasi 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2018	(%) capaian	ket
1	2	3	4	5	6	7
8.	Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana dan masyarakat rawan bencana.	Jumlah PMKS	100 org	100 org	100 %	Tetap
		Jumlah lokasi pengendalian program PKH	14 Kab/kota	14 Kab/kota	100 %	Tetap
		Pembinaan Bagi TAGANA (KSB)	100 orang	50 org	50 org	turun
		Jumlah PMKS yang menerima bantuan Korban Bencana Sosial	300 Org	1 Lap.	100 %	Tetap

Bila dibandingkan dengan target Renstra, realisasi Tahun 2019 bersifat tetap sesuai dengan ketersediaan dana untuk setiap indikator kinerja.

7.2 Outcomes (Manfaat)

Manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah memberikan kontribusi terhadap program – program nasional yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah seperti pelaksanaan program PKH. Program ini mensyaratkan adanya kontribusi dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena terdapat beberapa keterbatasan program yang dikaitkan dengan geografis wilayah diantaranya lokasi sasaran yang cukup jauh sehingga anggaran yang tersedia kurang mencukupi. Selain itu potensi SDM pelaksana juga harus tetap ditingkatkan melalui pendampingan-pendampingan yang terencana.

Sementara itu, Kegiatan pembinaan KSB dengan jumlah 50 orang pada tahun 2019. Bentuk kegiatan berupa terlaksananya Bimtek Bagi TAGANA, Tokoh masyarakat dan pengerahan massa untuk penanganan bencana. Selain bersifat preventif kegiatan ini juga diharapkan mampu memberi kesadaran kepada mereka tentang pengenalan potensi yang ada di lingkungan mereka berkaitan dengan bila ada bencana maka sebelum mereka meminta sumbangan kepada masyarakat harus melaporkan atau membuat ijin untuk meminta sumbangan kepada pihak masyarakat sebagai dasar meminta sumbangan.

C. ASPEK KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mendapat anggaran belanja dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 29.955.892.536 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp. 28.561.333.867 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan realisasi fisik sebesar (95,80%)

Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran	Pagu	Realisasi	Prosentase
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.090.000.000	2.045.554.072	98,12
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.195.635.000	8.955.060.159	98,64
3.	Program pembinaan anak terlantar	150.000.000	137.942.100	92,00
4.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	455.000.000	426.613.155	94,32
5.	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	1.500.000.000	1.425.748.032	97,00
6.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	435.000.000	385.613.514	90,45

7.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.677.500.000	1.613.610.744	98,18
8.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.693.850.000	3.412.389.772	94,74

D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada Tahun Anggaran 2019, masih terdapat permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu

1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum sepenuhnya akurat *By Name By Address* (BNBA), sehingga ketepatan sasaran belum maksimal.
2. Alokasi dana APBD untuk pembangunan kesejahteraan sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah masih terbatas, sehingga penanganan PMKS masih tergantung pada dana APBN.
3. Kebijakan perubahan anggaran yang dilakukan pada Triwulan 4, menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak mempunyai cukup waktu sehingga serapan kinerja maupun keuangan menjadi tidak maksimal.
4. Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Tengah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang jumlah dananya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
5. Mutasi jabatan yang cukup singkat di di Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan kesinambungan program menjadi terganggu karena pengalihan jabatan tidak diimbangi dengan pelimpahan tugas dan pekerjaan.
6. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi dalam melakukan kegiatan di Kabupaten/Kota memerlukan proses koordinasi dalam waktu yang cukup lama, sehingga pelaksanaan kegiatan terpuncak pada akhir Tahun Anggaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan sehingga target sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan

kriteria PMKS yang telah ditentukan dan menghindari terjadinya salah sasaran program.

2. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah agar terus mengupayakan kenaikan APBD bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengusulkan dana sharing dalam program APBD untuk memaksimalkan program/kegiatan yang bersumber dana APBN, sehingga hasil kegiatan menjadi lebih maksimal.
4. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada Tahun 2019 sehingga permasalahan yang sama dapat diantisipasi pada masa mendatang.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2019 yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			2.090.000.000		2.045.554.072	98,12	
1	15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	920.000.000	370 Orang	891.865.708	97,00	
2	15.06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1.170.000.000	220 KK	1.153.688.364	99,00	
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			9.195.635.000		8.955.060.159	98,64	
3	16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	130.000.000	50 Orang	124.245.126	96,00	
4	16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi	150.000.000	1 Laporan	140.319.063	94,00	

		PMKS					
5	16.18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	200.000.000	39 Orang	188.491.300	95,00	
6	16.20	Pembangunan Sarana Panti Sosial	5.799.635.0000	8 Unit	5.655.824.067	99,00	
7	16.21	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	800.000.000	10 Orang	796.408.273	100	
8	16.22	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR	1.441.000.000	100 Orang	1.381.343.568	97,00	
9	16.23	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW	675.000.000	40 Orang	668.428.762	100	
17. Program pembinaan anak terlantar			150.000.000		137.942.100	92,00	
10	17.04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	150.000.000	15 Orang	137.942.100	92,00	
18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			455.000.000		424.613.155	93,32	
11	18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	275.000.000	15 Orang	274.391.000	100	
12	18.10	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	180.000.000	25 Orang	150.222.155	83,46	
19. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo			1.500.000.000		1.425.748.032	97,00	
13	19.07	Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo	1.500.000.000	80 Orang	1.425.748.032	97,00	
20. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			435.000.000		302.020.264	90,45	
14	20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	120.000.000	1 Laporan	74.490.500	68,00	
15	20.07	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	315.000.000	80 Orang	311.123.014	99,00	
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			1.677.500.000		1.613.610.744	98,18	
16	21.01	Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	300.000.000	35 Orang	296.566.300	99,00	
17	21.02	Pemberdayaan organisasi sosial	421.385.000	6 Orsos	415.462.402	99,00	
18	21.03	Pemberdayaan Karang Taruna	378.615.000	30 Orang	356.336.804	98,00	
19	21.05	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	400.000.000	1 Laporan	388.274.674	99,00	
20	21.06	Fasilitasi KOMDA lansia	127.500.000	1 Laporan	110.140.000	92,00	
21	21.09	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	50.000.000	1 Laporan	46.830.564	97,00	

37. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			3.693.850.000		3.412.389.772	94,74	
22	37.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1.060.750.000	100 Orang	951.270.900	93,00	
23	37.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	2.283.100.000	14 Kab/Kota	2.126.841.694	95,00	
26	37.05	Pembinaan Kampung Siaga Bencana Sosial (KSB)	50.000.000	50 Orang	49.685.000	100	
27	37.06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	300.000.000	1 Laporan	284.592.178	98,00	

BAB IV

P E N U T U P

A. PENUTUP

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa kendala yang terjadi dapat diatasi dengan baik sehingga realisasi keuangan dan realisasi kegiatan cukup baik.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2019 adalah penyempurnaan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang belum sempurna. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan yang mengganggu kinerja program. Kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat ditingkatkan dengan berkaca pada Laporan Kinerja ini.

B. SARAN

Memperhatikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana yang telah tercermin pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan yaitu :

1. Diperlukan penyesuaian anggaran dari Pemerintah Daerah untuk mengimbangi besaran dana dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti penanggulangan kemiskinan. Bila dicermati kondisi saat ini, perbandingan antara besaran dana antara Pemerintah Pusat dan Daerah cukup besar,
2. sehingga hal ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program/kegiatan pada jangka panjang.

3. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergitas program. Dengan demikian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kesatuan perencanaan yang terpadu dan saling mendukung. Program-program yang diluncurkan pusat dapat diteruskan secara tepat sasaran oleh pemerintah daerah dan memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat Kalimantan Tengah.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Palangka Raya, Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs. BUDI SANTOSO
Pembina Tingkat I
NIP. 19680316 199303 1 005

**CASCADING DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
TAHUN 2019**

Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum

RPJMD

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Pembinaan Bagi Anak Terlantar
4. Meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5. Meningkatnya Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial
7. Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
8. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani
2. Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan

ESELON II

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin

ESELON III

Sasaran strategis :
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Rawan Bencana
Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah PMKS
1. Jumlah lokasi pengendalian program PKH
2. Jumlah instansi/lembaga yang berpartisipasi
3. Jumlah pembinaan KSB

Sasaran strategis :

1. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Pembinaan Bagi Anak Terlantar
3. Meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah PMKS yang mengikuti KIE konseling dan kampanye social
2. Jumlah Anak terlantar, Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi
3. Jumlah Lanjut Usia dalam keluarga
4. Jumlah Penyandang Eks Psikotik di dalam Panti
5. Jumlah penyandang cacat dan trauma
6. Jumlah eks penyandang penyakit sosial
7. Jumlah korban tindak kekerasan di Trauma Center
8. Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)

Sasaran strategis :
Meningkatnya Pemberdayaan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Lokasi pemetaan / penjangjangan awal KAT
2. Jumlah TKSK
3. Jumlah LKS
4. Jumlah Karang Taruna
5. Jumlah masyarakat yang menanam nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial

Sasaran strategis :
Meningkatnya Pemberdayaan terhadap Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Keluarga Miskin
2. Jumlah Pendamping sosial

KEGIATAN :

1. Menyiapkan bahan logistik untuk korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
2. Fasilitasi pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pelopor Perdamaian, pendamping Kabupaten yang berpotensi dalam melaksanakan PKH dan Kampung Siaga Bencana (KSB)
3. Mendistribusikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk peserta PKH
4. Fasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya
5. Melaksanakan verifikasi, validasi terhadap korban Bencana Sosial
6. Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan logistik
7. Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA), pelopor perdamaian, dan Taruna Siaga Muda yang terampil, Petugas Pendamping Kabupaten yang berpotensi dalam melaksanakan PKH
8. Jumlah peserta PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
9. Jumlah orang terlantar yang tertangani
10. Jumlah Korban Bencana Sosial yang mendapatkan bantuan sosial

KEGIATAN :

1. Memfasilitasi pendistribusian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat
2. Memfasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas
3. Memfasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan bagi wanita rawan sosial ekonomi
4. Memfasilitasi penanganan tuna sosial
5. Jumlah Penyandang disabilitas berat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
6. Jumlah Penyandang disabilitas yang terfasilitasi
7. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang terfasilitasi
8. Jumlah tuna sosial yang tertangani
9. Memfasilitasi peserta pelatihan bagi anak terlantar
10. Memfasilitasi bantuan pemenuhan kebutuhan pangan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat bantuan
11. Jumlah anak terlantar yang terampil
12. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

KEGIATAN :

1. Fasilitasi pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Fasilitasi pembinaan pemahaman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
3. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
4. Memfasilitasi pemberian bantuan bahan kebutuhan dasar bagi KK warga KAT
5. Jumlah TKSK, PSM, Petugas Organisasi, Karang Taruna, dan Penyuluh Sosial yang terampil
6. Jumlah peserta kegiatan pelatihan tentang pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial yang bersertifikat
7. Jumlah makam pahlawanan dan monumen dalam keadaan baik
8. Jumlah KK Warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

KEGIATAN :

1. Melaksanakan Bimbingan teknis ekonomi produktif (UEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
2. Melaksanakan supervisi kegiatan identifikasi Fakir Miskin ekonomi produktif (UEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
3. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
4. Melaksanakan Monitoring terhadap bantuan Stimulan
5. Memberikan pendampingan dan bantuan stimulan terhadap masyarakat Miskin/orang tidak mampu dalam Basis Data Terpadu (BDT)
6. Melaksanakan supervisi kegiatan identifikasi Fakir Miskin yang masuk dalam BDT melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pelaksanaan Tugas/kegiatan
7. Melaksanakan Monitoring terhadap Basis Data Terpadu (BDT)
8. Jumlah UEP KUBE Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau kecil
9. Terlaksanakannya pengawasan kegiatan identifikasi Fakir Miskin dan ekonomi produktif (UEP) KUBE untuk keluarga miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pulau-pulau Kecil
10. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
11. Terlaksananya kegiatan bantuan Stimulan KUBE Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan pulau-pulau kecil
12. Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam Basis Data Terpadu (BDT)
13. Terlaksananya pengawasan Identifikasi Fakir Miskin yang Masuk Dalam Basis Data Terpadu (BDT)
14. Jumlah Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah di Verivali
15. Terlaksananya kegiatan hasil kegiatan Verivali terhadap Basis Data Terpadu (BDT)

ESELON IV